

Dialog Jumat dan Deteksi Dini Krisis

KORBAN tewas berjatuhannya menyusul bencana asap di Sumatera dan Kalimantan. Sementara itu, Salim Kancil, penolak penambangan pasir di Selok Awar-Awar, Lumajang, tewas akibat dikeroyok pendukung penambangan yang merusak lingkungan itu. Ada pula perusakan tempat ibadah di Aceh Singkil, serbuan salat hari raya di Tolikara, dan berbagai tragedi sosial di daerah lain. Semua itu sejatinya bisa dihindari manakala tersedia deteksi sosial dini.

Krisis sosial dan lingkungan yang menjatuhkan korban tewas tersebut adalah akibat komunikasi rakyat dengan pemimpin terputus dan tidak produktif. Deteksi sosial dini bisa dilakukan dengan membuka ruang dialog reguler antara pejabat daerah dan seluruh lapisan masyarakat, seperti dilakukan Bupati Bojonegoro Suyoto setiap bakda salat Jumat yang sudah berlangsung ratusan kali. Itulah ijhtihad demokrasi seorang kepala daerah dalam menyelesaikan berbagai problem yang dihadapi rakyatnya.

Jika setiap saat rakyat bisa *wadul* (mengadu) kepada pemimpinnya, bupati atau gubernur, ketua partai, organisasi sipil, Muhammadiyah dan NU, atau gereja, banyak persoalan bisa diselesaikan sebelum berubah menjadi bencana. Sebab, bencana asap, konflik Aceh Singkil dan Tolikara, serta kerusuhan yang mengakibatkan Salim Kancil tewas bukan peristiwa sesaat yang terjadi tiba-tiba. Tetapi, itu berakar dari problem sosial yang

muncul tanpa solusi.

Selama ini hubungan pemimpin sosial-politik daerah hanya terpelihara saat pilkada, pemilu legislatif dan presiden, serta pergantian pemimpin partai dan organisasi sipil-keagamaan. Diluar itu, rakyat seolah menghadapi problem hidup sendiri tanpa panduan sang pemimpin.

Kebetulan, pilkada serentak kini mulai menghangat di berbagai pelosok negeri. Janji-janji mulai ditebar guna memikat hati rakyat agar memilih sang pasangan calon.

Demokrasi memang lebih sering berkarya sesaat masa kampanye, sesudah itu dilupakan. Demokrasi menjadi kata sakti yang hanya ada di ruang *pamujan*, ketika sang dewa sedang bertakhta jauh di langit lapis ketujuh.

Berbeda dari situasi sosial-politik dalam Dialog Jumat Bupati Bojonegoro. Hubungan pertemanan sang pemimpin dengan rakyat bagai embun menetes teratur, memberikan napas kepada rakyat setiap saat ketika menghadapi masalah.

Pendapa Kabupaten Bojonegoro menjadi rumah rakyat yang setiap Jumat dibuka bagi siapa pun untuk hadir tanpa protokol. Dengan satu agenda: mengadu kepada sang bupati.

Jumat, 14 Agustus 2015, misalnya. Seperti Jumat sebelumnya atau sesudah itu, beberapa puluh orang sejak pukul 13.00 WIB menunggu orang nomor satu Bojonegoro dalam dialog Jumat ke-104. Tidak lama yang ditunggu hadir, Bupati Suyoto langsung duduk di sisi kiri pendapa.



O l e h

ABDUL MUNIR MUL KHAN*

Dialog yang sudah berlangsung itu tengah mendengar penjelasan kepala dinas perhubungan tentang perubahan arus lalu lintas Jalan Rajawali menjadi satu arah. Selesai pemaparan, seorang warga ke depan menyambar mikrofon, tanpa dipersilakan moderator. Dia memprotes perubahan arus menjadi satu arah yang disebutnya membuatnya bangkrut.

Tiba-tiba seorang perempuan parobaya, dengan pakaian seperti habis mencuci piring, maju. Mewakili PKL, dia memprotes larangan PKL berjualan di alun-alun. "Peraturan bupati itu menyengsarakan rakyat," kata ibu itu tanpa beban.

Penjelasan kepala satpol PP tentang peraturan bupati tidak digubris warga. Ibu itu kembali maju, tanpa meminta izin kepada moderator. Dengan lantang, dia sebut Bu Aminah—menyalahkan langkah satpol PP.

Di tengah diskusi yang mulai "panas", seorang perempuan berusia 50-an tahun maju, kemudian meng-

adu kepada bupati tentang rumahnya yang terbakar saat bekerja di pasar.

Mendengar itu, bupati memanggil kepala BNPBD, dipertemukan dengan perempuan yang rumahnya terbakar. Lantas, ibu tersebut diberi santunan dan bantuan agar bisa menempati rumahnya kembali.

Seorang ibu 60-an tahun juga maju, duduk di samping bupati tanpa permissi, mengeluh karena kalungnya yang dipinjam tetangga tidak segera dikembalikan.

Bupati berseloroh, "*Lho... ngutang-ngutangke dewe, kok saiki njaluk bantuan. Yo diurus dewe to!*" Ibu itu tersenyum malu.

Bupati menelepon seseorang, lalu berucap, "*Petinggine (lurah) yang ngurus. Iki ngomong dewe!*" Ibu itu tampak gelagapan. "*Wis, utangpiutangmu nanti diselesaikan Pak Lurah!*" kata bupati, lantas tersenyum. "*Matir nuwun, Kang Yoto!*" jawab ibu itu tersipu, kembali duduk di tengah-tengah hadirin.

Sementara satpol PP kewalahan menghadapi kritik dan protes PKL, bupati maju naik ke podium. "*Sik, sereh, gentenan leh ngomong (Tunggu, tenang, gantian yang ngomong),*" seru bupati dengan senyum kebabakan.

"*Dadi satpol PP kok rekoso temen. Yen ora nglarang, salah. Yen glarang, diprotes... dibodok-bodokke!*" Bupati melanjutkan, "*Kepala satpol PP iki mbiyen kulite kuning, lho! Saiki dadi ireng, mergo kerep diprotes PKL!*" Hadirin pun tertawa lepas, membuat suasana cair.

Tiba-tiba beberapa PKL melontarkan protes dengan teriakan serentak. Seorang ibu maju, kemudian memegang mikrofon, meminta kebijakan bupati dicabut, atau diberi tempat permanen.

Dengan senyum, bupati menyela, "*Ojo njaluk to, tapi tuku. Wong gelange gede, kok njaluk.*" Terjadi dialog hangat, bupati dengan ibu yang ngotot minta larangan PKL dicabut didukung teriakan teman-teman PKL.

Jam menunjuk 15.30. Bupati menyatakan bahwa berjualan di alun-alun diizinkan sementara, sambil mencari solusi permanen. Pernyataan bupati itu disambut gembira PKL.

Dialog pun usai. Hadirin dan PKL tertib maju ke depan, meminta maaf bersalaman dengan bupati, moderator, dan pejabat pemda. Mereka pulang dengan senyum. Dalam Dialog Jumat beberapa minggu berikutnya, pedagang PKL bersedia pindah ke lokasi baru yang disepakati bersama.

Jumat merupakan hari demokrasi bagi warga Bojonegoro. Seluruh rakyat bisa datang di pendapa, mengadukan problem yang dihadapi kepada pemimpinnya.

Berapa banyak pemimpin daerah bersedia membuka ruang dialog bagi warganya, sebelum bencana asap, Singkil, Tolikara, dan Selok Awar-Awar terjadi? (*)

*) Guru besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, komisioner Komnas HAM 2007-2012